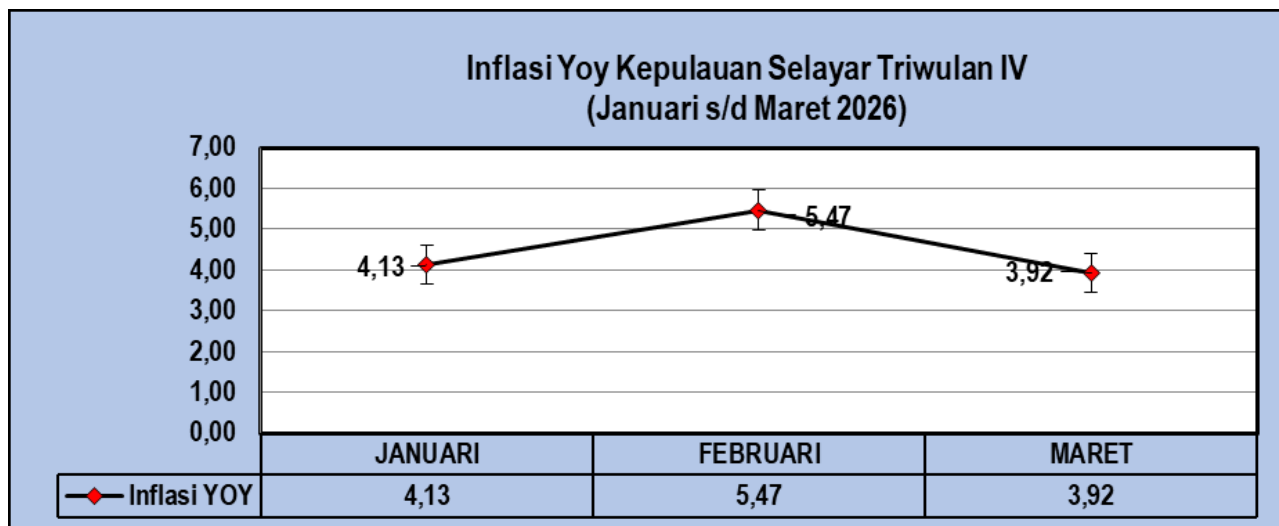


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. INFLASI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG BERADA DI ZONA INFLASI BULUKUMBA TRIWULAN I-2026



2. PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA UNTUK TRIWULAN KE I-2026

Berdasarkan hasil pemantauan harga komoditas periode Januari hingga Maret 2026, perkembangan harga komoditas di pasar menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa kelompok komoditas tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan.

Pada kelompok bahan pangan pokok, seperti beras, gula pasir, tepung terigu, serta beberapa komoditas kebutuhan dasar lainnya, harga cenderung stabil dengan kisaran antara Rp12.000 hingga Rp17.500 per kilogram. Stabilitas ini mencerminkan bahwa pasokan komoditas pokok relatif aman dan distribusi berjalan lancar tanpa adanya gangguan berarti selama periode pengamatan.

Berbeda dengan kelompok hortikultura, khususnya cabai dan bawang, yang menunjukkan volatilitas harga cukup tinggi. Harga cabai mengalami peningkatan signifikan pada bulan Februari, berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp60.000 per kilogram, kemudian mengalami penurunan pada bulan Maret menjadi sekitar Rp50.000 per kilogram. Fluktuasi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor musiman, keterbatasan pasokan, serta tingginya permintaan pasar.

Sementara itu, harga bawang merah juga mengalami pola yang serupa, dengan kenaikan harga dari kisaran Rp45.000 menjadi Rp51.500 per kilogram, sebelum kembali turun dan stabil di kisaran Rp45.000 per kilogram pada bulan Maret. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan pasokan pada periode tertentu yang kemudian kembali normal.

Pada kelompok minyak goreng, harga menunjukkan pergerakan yang bervariasi antar jenis produk. Sebagian komoditas berada pada kisaran harga Rp45.000 per liter, sementara terdapat komoditas yang mengalami penurunan harga cukup signifikan hingga mencapai

Rp15.700 per liter pada bulan Maret. Penurunan ini mengindikasikan adanya intervensi pasar, peningkatan pasokan, atau perubahan kebijakan distribusi yang berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen.

Untuk kelompok protein hewani, harga telur ayam ras dan daging ayam ras berada pada kisaran Rp37.500 hingga Rp50.000 per kilogram, dengan kecenderungan fluktuasi moderat. Pada beberapa periode terjadi kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan penurunan kembali, menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan pasokan yang relatif terjaga.

Di sisi lain, komoditas daging sapi menunjukkan harga yang relatif tinggi dibandingkan komoditas lainnya, dengan kisaran mencapai Rp70.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Tingginya harga ini mencerminkan karakteristik komoditas yang memiliki biaya produksi dan distribusi lebih besar serta sensitivitas terhadap pasokan yang terbatas.

Secara keseluruhan, kondisi harga komoditas selama periode Januari hingga Maret 2026 masih berada dalam kategori stabil dan terkendali, dengan fluktuasi yang masih dalam batas wajar. Tidak terdapat lonjakan harga yang bersifat ekstrem secara menyeluruh, dan ketersediaan pasokan di pasar relatif terjaga. Perubahan harga yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor musiman, distribusi, dan dinamika permintaan, khususnya pada komoditas hortikultura dan protein hewani.

Berikut Tabel Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya :

NO KOMODITAS		HARGA (Rp)		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	2	3	4	5
1	Beras Cap Empat Delapan (Medium)	13.500	13.500	13.500
2	Beras Cap Mawar merah (Medium)	14.900	14.900	14.900
3	Beras Cap Ayam Jantan (Premium)	17.500	17.500	17.500
4	Beras Cap Bromo (Premium)	14.900	14.900	14.900
5	Beras Cap Jampea (Khusus)	13.500	13.500	13.500
6	Beras SPHP Bulog	12.000	12.000	12.000
7	Cabai Merah Keriting,1 kg	25.000	38.000	38.000
8	Cabai Merah Besar,1 kg	25.000	38.000	38.000
9	Cabai Rawit Merah,1 kg	30.000	60.000	50.000
10	Cabai Rawit Hijau,1 kg	30.000	60.000	50.000
11	Bawang Merah,1 kg	35.000	48.000	51.500
12	Bawang Putih Honan,1 kg	40.000	45.000	45.000
13	Gula Pasir Curah, 1kg	20.000	20.000	20.000
14	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	23.000	23.000	24.000
15	Minyakita,1 lt	20.000	20.000	15.700

16	Tepung Terigu,1 kg	12.000	12.000	12.000
17	Telur Ayam Ras,1 kg	30.000	30.000	37.500
18	Telur Ayam Kampung,1 kg	50.000	50.000	50.000
19	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	40.000	40.000	45.000
20	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	70.000	70.000	70.000
21	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	125.000	125.000	140.000
22	Ikan Bandeng,1 kg	50.000	50.000	50.000
23	Ikan Tongkol,1 kg	30.000	30.000	30.000
24	Ikan Teri,1 kg	150.000	150.000	150.000

3. RESIKO KEDEPAN

Memasuki Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas harga dan inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Permintaan Komoditas Protein Hewani

Perayaan Idul Adha identik dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap komoditas protein hewani, khususnya daging sapi dan daging ayam ras. Selain itu, permintaan terhadap ternak hidup seperti sapi dan kambing juga mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan permintaan ini berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama apabila pasokan lokal tidak mencukupi.

2. Gangguan Distribusi dan Biaya Logistik

Distribusi ternak dan komoditas pangan lainnya masih bergantung pada transportasi laut. Kendala cuaca, keterbatasan armada, serta kenaikan biaya logistik dapat memengaruhi kelancaran distribusi, sehingga berdampak pada harga di tingkat konsumen.

3. Fluktuasi Harga Komoditas Pendukung

Selain daging, beberapa komoditas pendukung seperti beras, minyak goreng, bumbu dapur (cabai dan bawang), serta bahan pangan lainnya juga berpotensi mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode Idul Adha.

Pada Triwulan II Tahun 2026, stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terdampak oleh peningkatan permintaan komoditas protein hewani selama HBKN Idul Adha, keterbatasan pasokan ternak, serta kendala distribusi dan logistik. Risiko tersebut dapat mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas daging sapi, daging ayam, serta bahan pangan pendukung lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan ketersediaan stok secara intensif, serta pengamanan distribusi dan pasokan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari hasil identifikasi yang Tim Pengendalian Inflasi Daerah setidaknya ada 2 situasi dan kondisi utama yang seringkali menjadi kendala atau permasalahan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. KETERGANTUNGAN PADA PASOKAN EKSTERNAL

Kepulauan Selayar belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pokok dari produksi lokal, sehingga Beberapa komoditas bahan pokok termasuk beras, cabai, Bawang Merah dan lain-lain, rata-rata berasal dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini membuat harga rentan naik jika terjadi fluktuasi pasokan dan gangguan distribusi.

2. KONDISI GEOGRAFIS, INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI SERTA ANOMALI CUACA

Sebagai daerah kepulauan, distribusi barang kebutuhan pokok bergantung pada transportasi laut yang rentan terhadap cuaca buruk. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan daerah-daerah yang dapat dijangkau melalui lintas darat. Kondisi ini menyebabkan biaya logistik tinggi dan potensi keterlambatan pasokan, yang pada akhirnya menyebabkan “kelangkaan” di masyarakat yang tentunya bermuara pada terjadinya kenaikan harga. Anomali cuaca buruk tidak hanya membuat Nelayan susah melaut, tetapi juga memutus jalur distribusi utama. JARAK + CUACA = tantangan ganda.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya preventif sekaligus sebagai skenario antisipatif untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga yang dikhawatirkan dapat memicu inflasi di daerah, sepanjang Triwulan I (Januari s/d Maret) 2026, telah dilaksanakan beberapa upaya dan strategi melalui program kerja dan kegiatan sebagai berikut:

1. RAPAT KOORDINASI MINGGUAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	Senin, 12 Januari 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
2	Senin, 19 Januari 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 3 | Selasa, 27 Januari 2026 | Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026 |
| 4 | Senin, 9 Februari 2026 | Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026 |
| 5 | Rabu, 18 Februari 2026 | Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026 |
| 6 | Selasa, 3 Maret 2026 | Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026 |
| 7 | Senin, 9 Maret 2026 | Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026 |
| 8 | Senin, 16 Maret 2026 | Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026 |

2. GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	Kamis, 22 Januari 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.	
2	Senin, 26 Januari 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di tingkat masyarakat.	
3	Jumat, 13 Februari 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyediaan pangan dengan harga terjangkau.	
4	Kamis, 19 Februari 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di daerah.	
5	Kamis, 26 Februari 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka mendukung upaya stabilisasi harga pangan melalui intervensi pasar.	
6	Jumat, 27 Februari 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau.	
7	Sabtu, 28 Februari 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.	

8	Minggu, 1 Maret 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pangan pokok.
9	Senin, 2 Maret 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan bahan pangan di masyarakat.
10	Selasa, 3 Maret 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah melalui intervensi harga pangan.
11	Rabu, 11 Maret 2026	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Keterangan Pelaksanaan :

Pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkelanjutan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi dinamika harga pangan pada awal tahun.

Selama periode ini, GPM dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali yang tersebar di beberapa lokasi strategis guna menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pelaksanaan kegiatan melibatkan perangkat daerah terkait serta bekerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan secara rutin baik di lingkungan perkantoran maupun di lokasi yang dekat dengan aktivitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Secara umum, pelaksanaan GPM pada Triwulan I Tahun 2026 berjalan dengan lancar dan berkesinambungan, serta memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu instrumen strategis Pemerintah Daerah dalam mendukung pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. HIGH LEVEL MEETING (HLM) TPID (16 MARET 2026)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul

Fitri 1447 Hijriah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar pada Senin, 16 Maret 2026, dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, dan perwakilan instansi vertikal. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi strategis untuk:

1. Membahas kesiapan pasokan dan distribusi bahan pokok, BBM, dan gas LPG menjelang Idul Fitri,
2. Mengantisipasi potensi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat,
3. Memastikan kelancaran distribusi serta stabilitas layanan transportasi dan energi selama periode mudik dan arus balik, serta
4. Memperkuat sinergi dan koordinasi antara TPID, OPD terkait, Bulog, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.

Dalam HLM disampaikan bahwa momentum Idul Fitri identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada meningkatnya permintaan kebutuhan pokok, energi, serta layanan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif dan responsif guna menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan di masyarakat.

HLM ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok menjelang periode permintaan tinggi Idul Fitri, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

DOKUMENTASI :

4. Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Pasokan (25 Februari 2026)

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara rutin melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta lokasi produksi. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Pada periode bulan Februari 2026, khususnya selama bulan Ramadan, kegiatan pemantauan turut dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan daerah. Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, melakukan peninjauan lapangan di Pasar Sentral Bonea serta sejumlah titik perbelanjaan di Kota Benteng guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan pada sektor peternakan sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan komoditas protein hewani, khususnya daging sapi dan ternak lainnya. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pasokan ternak, kesiapan distribusi, serta potensi kendala yang dapat memengaruhi harga di tingkat konsumen, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dilakukan dialog langsung dengan pedagang, pelaku usaha, serta peternak untuk memperoleh informasi aktual terkait perkembangan harga, pasokan, dan distribusi. Hasil pemantauan tersebut menjadi bagian dari bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Selayar.

DOKUMENTASI :

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2026 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup efektif dan terkendali. Hal ini tercermin dari relatif stabilnya harga komoditas pangan strategis, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa komoditas tertentu, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

1. Aspek Ketersediaan Pasokan

Dari sisi ketersediaan pasokan, Pemerintah Daerah melalui Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain pemantauan stok secara berkala, koordinasi dengan distributor dan Bulog, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Upaya ini terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, serta komoditas lainnya tetap dalam kondisi aman, meskipun terdapat tekanan permintaan pada periode tertentu.

Namun demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi tantangan utama, terutama untuk komoditas hortikultura dan protein hewani. Kondisi geografis kepulauan juga turut memengaruhi stabilitas pasokan.

2. Aspek Keterjangkauan Harga

Dari sisi keterjangkauan harga, kebijakan yang ditempuh melalui pelaksanaan GPM, operasi pasar, serta intervensi harga lainnya cukup efektif dalam menahan laju kenaikan harga. Harga komoditas pokok relatif stabil, meskipun terjadi kenaikan pada komoditas tertentu seperti cabai, bawang, dan daging sapi. Kegiatan GPM yang dilaksanakan secara rutin di berbagai lokasi strategis mampu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat.

3. Aspek Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor kunci dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar, termasuk dalam menghadapi kendala cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Meskipun demikian, faktor cuaca dan keterbatasan sarana transportasi laut masih menjadi kendala yang berpotensi menghambat distribusi, sehingga berdampak pada ketersediaan dan harga komoditas di pasar.

4. Aspek Komunikasi Efektif

Dalam aspek komunikasi, TPID Kabupaten Kepulauan Selayar secara aktif melakukan koordinasi melalui rapat rutin dan High Level Meeting (HLM). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi antar instansi, serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait kondisi harga dan ketersediaan pangan. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta stakeholder lainnya berjalan dengan baik dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pengendalian inflasi.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berjalan dengan baik dan cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Hal ini didukung oleh sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan serta pelaksanaan program strategis seperti GPM dan penguatan koordinasi TPID.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara

lain ketergantungan pasokan dari luar daerah, kendala distribusi akibat faktor geografis dan cuaca, serta fluktuasi harga pada komoditas tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mengoptimalkan peran TPID dalam pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI/RENCANA PENGENDALIAN INFLASI KEDEPAN

Berdasarkan evaluasi Triwulan I Tahun 2026 dan potensi risiko Triwulan II Tahun 2026, beberapa opsi rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ketersediaan Pasokan

- Melakukan pemantauan stok bahan pangan strategis secara berkala dan terintegrasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha untuk memastikan kecukupan pasokan, khususnya menjelang HBKN Idul Adha.
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan produksi lokal, terutama komoditas hortikultura dan perikanan, guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

2. Pengendalian Keterjangkauan Harga

- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin dan terjadwal pada lokasi strategis, termasuk pasar tradisional dan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi.
- Melakukan operasi pasar pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai, bawang, dan daging.
- Penyusunan dan penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Tim Pemantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya,

3. Penguatan Kelancaran Distribusi

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran distribusi, terutama melalui jalur laut sebagai moda utama di wilayah kepulauan.
- Mengoptimalkan dukungan sarana transportasi dan logistik untuk menekan biaya distribusi.

4. Penguatan Komunikasi Efektif

- Melaksanakan rapat koordinasi TPID secara rutin dan High Level Meeting (HLM) menjelang periode rawan inflasi.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi yang bijak, khususnya pada periode HBKN.

1. Pengendalian Komoditas Prioritas Idul Adha

- Melakukan pemantauan harga ternak dan daging secara intensif menjelang dan selama Idul Adha.
- Mengantisipasi lonjakan harga komoditas pendukung seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang melalui intervensi pasar.